



PETA RISIKO

DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka mendukung gerakan reformasi birokrasi, yang sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2020, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang Sumber Daya Manusia didalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan, sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (*probability*) kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Risiko mengacu pada ketidakpastian (*uncertainty*). Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau hasilnya dimasa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan (manajemen) risiko.

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5 (1), pimpinan instansi pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Implementasi SPIP Provinsi Kepulauan Riau berlandaskan kepada beberapa aturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
8. Perataruan Daerah Provinsi kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau;
9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Sekretariat Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Peta risiko pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.
3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian risiko pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh Bidang dan Sub Bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
- c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

E. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah *sharing* dan *brainstorming* (curah pendapat) yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

F. Sistematika Pelaporan

Peta risiko Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini disusun dalam struktur bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Bab II Gambaran Umum Entitas

Dalam Bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas Kesehatan Provinsi dari segi organisasi (struktur organisasi dan uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core business process) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Bab III Hasil Penilaian Risiko

Merupakan hasil dari perhitungan peta risiko yang terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Organisasi

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan lembaga teknis dan membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menjalankan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sumber Daya Manusia dan Asset Dinas Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang esensial dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas suatu organisasi, sebab dengan adanya sumber daya manusia seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan dan bekerja lebih optimal. Sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau saat ini berdasarkan status, pangkat/golongan, tingkat pendidikan, kedudukan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan baik struktural, fungsional dan teknis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Menurut Status

Pegawai pada Dinas Kesehatan seluruhnya berjumlah 104 pegawai.

b. Menurut Pangkat/Golongan

Komposisi pegawai menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pejabat eselon II	1							
2	Pejabat eselon III	4	1						
3	Pejabat eselon IV	2	1	4	8				
4	Staf PNS		2	10	68	1	5		
Jumlah		8	2	14	69	1	5	0	0
Total PNS		104							

c. Menurut Tingkat Pendidikan

Sebaran tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Kesehatan:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Doktor (S3)	1
2	Pasca Sarjana (S2)	19
3	Sarjana (S1)	50
4	Diploma III	30
5	SLTA/ sederajat	4
6	SLTP	0
7	SD	0
	JUMLAH	104

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuan secara umum untuk mewujudkan Kepulauan Riau Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Guna mencapai tujuan umum tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Misi Gubernur Kepulauan Riau yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021 yaitu

MISI ke- 4 (Empat) : Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat melalui Tabel berikut ini :

**Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI (Gubernur Kepulauan Riau) :			
"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"			
MISI (Gubernur Kepulauan Riau) ke - 4 :			
Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang terjangkau dan berkualitas	Meningkatkan derajat kesehatan	Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas.	1. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>)
	Meningkatkan status gizi	Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat	3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan penyehatan lingkungan	4. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (<i>Primary Health Care</i>)
		Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	5. Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	6. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	7. Meningkatkan akses, mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan 8. Meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan
		Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan	
	Meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	
Tujuan 2 Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit	Menurunkan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular	Meningkatkan Pengendalian Penyakit

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Kesehatan membawahi:

- I. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- II. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- III. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- IV. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- V. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Terdiri dari 11 Program dan 56 Kegiatan Antara Lain:

NO	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4.	Program Kesehatan Masyarakat	1. Asuhan persalinan normal melalui P2KS Provinsi Kepri 2. Kelas Ibu Hamil Perangkat Daerah Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau 3. Orientasi PKPR dan peer conselor 4. Pelacakan kasus gizi buruk 5. Pengadaan taburia dalam rangka penurunan stating 6. Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan langsung kepada Masyarakat & Pengembangan Media Promkes 7. Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan 8. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kabupaten/Kota sehat 9. Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi 10. Pengembangan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi 11. Penyediaan makanan tambahan PMT Bumil KEK 12. Jambore Kader posyandu dalam mendukung kebijakan PHBS


NO	Program	Kegiatan
		13. Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu) 14. Penyediaan makanan tambahan Balita kurus
5.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1. Pengendalian pencegahan kasus kusta di Kab/Kota 2. Pengendalian pencegahan peningkatan kasus DBD/Malaria di Kab/Kota se Provinsi Kepri 3. Penanggulangan PD3i 4. Penanggulangan Penyakit Menular dan Berpotensi Wabah 5. Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di embarkasi batam 6. Penanggulangan dan pengendalian PTM
6.	Program Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan Metode pendekatan pelayanan kesehatan tradisional 2. Penyelenggaraan SP3T 3. Pengelolaan Jamkesda Provinsi Kepri (hibah) 4. Pendampingan Survei Akreditasi Rumah Sakit 5. Pertemuan kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) di FKTP 6. Kotingensi terpadu krisis kesehatan 7. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dan atau Pengadaan Alat Kesehatan RSUD/RS Jiwa 8. Penyelenggaraan Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Kepri 9. Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas 10. Pelayanan Kesehatan Aparatur 11. Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti social 12. Penunjang Program Akreditasi Puskesmas 13. Pengelolaan Jaminan Pelayanan

NO	Program	Kegiatan
		Penduduk miskin
7.	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 2. Pengelolaan instalasi farmasi prov kepri 3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan produksi dan distribusi kefarmasian 4. Distribusi obat dan pembekalan kesehatan
8.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif peserta internship Provinsi Kepri 2. Pengangkatan Tenaga Medis Non PNS 3. Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS 4. Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas 5. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
9.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2. Peningkatan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan asistensi pembangunan kesehatan 3. Sosialisasi juknis dan penyusunan RKA DAK 4. Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Kesehatan 5. Review standar operasional pelayanan (SOP) Dinas Kesehatan Prov Kepri
10.	Program Pengembangan Data/Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses informasi kesehatan melalui media website 2. Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kepri 3. Dukungan Riset Kesehatan

NO	Program	Kegiatan
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Rapat Kerja Kesehatan Daerah (rakerkesda) Provinsi Kepri
TOTAL	11 Program	56 Kegiatan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes**
 Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**
 selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **H. ISDIANTO, S.Sos. M.M**
 Jabatan : **Pjt. Gubernur Kepulauan Riau**
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tanjungpinang, Desember 2019

PIHAK KEDUA,
Pjt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



H. ISDIANTO, S.Sos. M.M

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19600630 198303 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.00 KH	129
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	31
2	Meningkatkan Status Gizi	Persentase Kekurangan Gizi (underweight) Pada Anak Balita	16,5
3	Menurunkan Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi HIV	<0.5
		Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100.000 Penduduk	170
		API (<i>Annual Parasite Incidence</i>) per 1.000 Penduduk	0,29
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	28,1%
4	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Minimal 1 RS terakreditasi	57,14
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	Paripurna
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban	Paripurna
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	50
5	Meningkatkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	78
6	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau	Cakupan Kabupaten / Kota Sehat (%)	70

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Kesehatan Masyarakat	Rp. 11.866.070.000	APBD
2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 2.200.886.000	APBD
3. Program Pelayanan Kesehatan	Rp. 18.303.917.107	APBD
4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Rp. 1.539.145.000	APBD
5. Program Pengembangan dan Pendetayagunaan SDM Kesehatan	Rp. 10.517.052.200	APBD
6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 1.023.784.823	APBD
7. Program Data / Informasi	Rp. 282.804.000	APBD

8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Rp.	2.666.130.000	APBN
9. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Rp.	6.747.850.000	APBN
10. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	Rp.	1.041.337.000	APBN
11. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	3.749.359.000	APBN
12. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Rp.	1.687.140.000	APBN
13. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Rp.	1.511.512.000	APBN

Tanjungpinang, Desember 2019

**PIHAK KEDUA,
Pjt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

H. ISDIANTO, S.Sos. M.M

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19600630 198303 1 013

BAB III

HASIL PENILAIAN RISIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat Jarang
2	10-30	Jarang
3	30-50	Sedang
4	50-90	Sering
5	> 90	Sangat Sering

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Tinggi	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis

Level	Deskriptor	Deskripsi
3	Sedang	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar
2	Rendah	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
1	Sangat Rendah	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekuensi maka akan diketahui tingkat konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci dapat dinyatakan dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, citra dan hubungan kepada masyarakat.

B. Register Risiko

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat/Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dapat diketahui bahwa terdapat 136 Risiko yang diukur berdasarkan 56 Kegiatan bersumber APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau TA. 2020. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokkan berdasarkan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Sekretariat/ Bagian	Dampak					Total	%
		Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)		
1	Sekretariat	3	12	11	3	3	32	24 %
2	Bidang	0	5	48	36	15	104	76 %
	Jumlah	3	17	59	39	18	136	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dampak resiko pada sekretariat adalah sebanyak 32 dampak (24%), sedangkan pada bidang berjumlah 104 dampak (76%). Adapun resiko paling banyak pada sekretariat adalah dampak dengan kategori rendah yaitu sebanyak 12 dampak, dan untuk bidang resiko dampak paling banyak adalah pada kategori sedang sebanyak 48 dampak.

Dari analisis dan pemetaan risiko terlihat juga bahwa pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan sangat jarang, jarang, sedang, sering dan sangat sering terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Analisis Kemungkinan Risiko

No.	Sekretariat/ Bidang	Kemungkinan					Total	%
		Sangat Jarang (1)	Jarang (2)	Sedang (3)	Sering (4)	Sangat Sering (5)		
1	Sekretariat	0	9	19	4	0	32	24 %
2	Bidang	1	11	71	19	2	104	76 %
Jumlah		1	20	90	23	1	136	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kemungkinan resiko pada sekretariat adalah sebanyak 32 kemungkinan, sedangkan pada bidang berjumlah 104 kemungkinan. Adapun resiko paling banyak pada sekretariat yaitu dengan kategori sedang sebanyak 19 kemungkinan, dan untuk bidang kemungkinan resiko paling banyak adalah pada kategori sedang dengan 71 kemungkinan resiko.

Hasil penghitungan dampak dikali kemungkinan resiko menghasilkan nilai level resiko dari suatu kegiatan. Nilai level resiko terbagi atas 3 (tiga) kategori dilihat berdasarkan hasil skor resiko. Kategori skor sebagai berikut :

Kategori Skor Risiko

Range Skor	Kategori Skor Resiko	Jumlah Risiko	%
< 9	Rendah	31 Resiko	23%
10-15	Sedang	98 Resiko	72%
>16	Tinggi	7 Resiko	5%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada level kategori skor resiko rendah (nilai skor <9) berjumlah 31 resiko dengan persentase sebesar

23%, pada kategori sedang (nilai skor 10-15) berjumlah 98 resiko dengan persentase sebesar 72% dan pada kategori tinggi (nilai skor >16) berjumlah 7 resiko dengan persentase sebesar 5%.

Dari 136 resiko yang dianalisa, berdasarkan Bidang Pengelola Kegiatan didapat rincian level resiko sebagai berikut :

**Strata Level Resiko berdasarkan Sekretariat/Bidang
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Level Resiko	Sekretariat	Bidang	Jumlah
1	Rendah	17	14	31
2	Sedang	13	85	98
3	Tinggi	2	5	7
Jumlah		32	104	136

Berdasarkan tabel strata level resiko diatas, menunjukkan bahwa pada Bidang Sekretariat terdapat 32 pernyataan resiko dengan rincian 17 resiko rendah, 13 resiko sedang dan 2 resiko tinggi. Pada penilaian resiko dari 4 Bidang diketahui bahwa terdapat 104 resiko, dengan rincian 14 resiko rendah, 85 resiko sedang dan 5 resiko tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Penilaian risiko di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mencakup seluruh Bidang. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Peta Risiko.

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan risiko sebanyak 136 risiko dari total 56 kegiatan yang dilakukan penilaian risiko. Dampak risiko pada sekretariat adalah sebanyak 32 dampak (24%), sedangkan pada bidang berjumlah 104 dampak (76%).

Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di tataran kegiatan. Hasil analisis dampak menunjukkan level dampak yang paling banyak terjadi yaitu pada level "sedang" dengan jumlah 59 risiko, yang terendah pada level dampak "sangat rendah" yaitu 3 risiko. Berdasarkan level kemungkinan, 90 risiko terjadi pada level "sedang".

Hasil penghitungan dampak dikali kemungkinan risiko menghasilkan nilai level risiko dari suatu kegiatan. Nilai level risiko terbagi atas 3 (tiga) kategori. Dari 136 risiko yang dianalisa, menunjukkan bahwa pada Bidang Sekretariat terdapat 32 pernyataan risiko dengan rincian 17 risiko rendah, 13 risiko sedang dan 2 risiko tinggi. Pada penilaian risiko dari 4 Bidang diketahui bahwa terdapat 104 risiko, dengan rincian 14 risiko rendah, 85 risiko sedang dan 5 risiko tinggi.

Peta Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan

bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua Perangkat Daerah dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau umumnya, dan di Dinas Kesehatan Provinsi secara khusus.

LAMPIRAN

- A. Daftar Register Risiko Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2020

**REGISTER RESIKO DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2020**

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
1	Program Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan langsung kepada Masyarakat & Pengembangan Media Promkes	Terlaksananya Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan Thd Masyarakat & Pengembangan Media Promkes	1	Keterbatasan Anggaran	1. Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Kegiatan Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan Thd Masyarakat & Pengembangan Media Promkes. 2. Masyarakat tidak memperoleh informasi terkini tentang kesehatan sehingga mempersulit pencapaian masyarakat ber-PHBS	4	3	12	Sedang	1. Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun:	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	1. Kabid 2. Masyarakat
					2	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	2. Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	2. Memberikan pembinaan kepada Staf:	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi
					3	Pemahaman terhadap proses pengadaan barang dan jasa belum optimal	3. Kurangnya pemahaman terhadap proses pengadaan	C	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan Thd Masyarakat & Pengembangan Media Promkes	2	4	8	Rendah	3. Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2020	Kasi dan staf
					4	Media dan Metode promosi yang digunakan kurang inovatif	4. Kurangnya SDM yang memahami tentang teknologi informasi media Pengembangan Promkes	C	Media promosi dan metode yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.	4	3	12	Sedang	4. Melibatkan pihak ketiga yang memahami teknologi informasi pengembangan media promkes	3	Pemenuhan tenaga SDM Design Grafis untuk media	2020	Masyarakat
			Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu	Terlaksananya Workshop Pembinaan UKBM dalam mendukung Kebijakan PHBS	1	Keterbatasan Anggaran	1. Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu Tahun 2019 2. Kader sulit memperoleh informasi terkini tentang kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitasnya	5	3	15	Sedang	1. Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun:	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	1. Kabid 2. Masyarakat
					2	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	2. Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	2. Memberikan pembinaan kepada Staf:	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
					3	Pemahaman terhadap proses pengadaan barang dan jasa belum optimal	3. Kurangnya pemahaman terhadap proses pengadaan	C	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan workshop peningkatan kompetensi kader posyandu sehingga terlambat sampai kepada kader sebagai peserta	2	4	8	Rendah	3. Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2020	Kasi dan staf
		Pengembangan Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Terlaksananya penilaian perwakilan sekolah sehat Provinsi Kepulauan Riau	1	Keterbatasan Anggaran	1. Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2020. 2. Sekolah tidak memperoleh pembinaan untuk pengembangan sekolah agar menjadi sekolah sehat	5	3	15	Sedang	1. Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun.	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	1. Kabid 2. Sekolah	
				2	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	2. Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	2. Memberikan pembinaan kepada Staf.	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi	
				3	Media dan Metode promosi yang digunakan kurang inovatif	4. Kurangnya kapasitas SDM yang memahami program dan mampu membuat informasi media Pengembangan Promkes terkait sekolah sehat	C	Media promosi, metode dan informasi yang dihasilkan tidak maksimal	4	3	12	Sedang	4. Memberikan pembinaan dan pelatihan pada staf	3	Memberikan Pelatihan tentang Program	2020	Sekolah	
		Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menurunkan angka kematian terhadap bahaya penyakit menular (HIV dan AIDS) serta penyakit tidak menular (Kanker dan Jantung) di Provinsi Kepulauan Riau	1	Keterbatasan Anggaran	1. Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bidang Kesehatan. 2. Masyarakat tidak memperoleh informasi terkini tentang Penyakit Menular dan Penyakit tidak menular	5	3	15	Sedang	1. Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun.	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	1. Kelembagaan terkait 2. Masyarakat	
				2	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	2. Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	2. Memberikan pembinaan kepada Staf.	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi	
				3	Pemahaman terhadap proses pengadaan barang dan jasa belum optimal	3. Kurangnya pemahaman terhadap proses pengadaan	C	Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa Penyampaian Informasi/ Kampanye Kesehatan Thd Masyarakat & Pengembangan Media Promkes	2	4	8	Rendah	3. Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2020	Kasi dan staf	
				4	Media dan Metode promosi yang digunakan kurang inovatif	4. Kurangnya SDM yang memahami tentang teknologi informasi media Pengembangan Promkes	C	Media promosi dan metode yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.	4	3	12	Sedang	4. Melibatkan pihak ketiga yang memahami teknologi informasi pengembangan media promkes	3	Pemenuhan tenaga SDM Design Grafis untuk media	2020	Masyarakat	

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
			Jambore Kader Posyandu Dalam Mendukung Kebijakan PHBS	Melaksanakan Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	1	Keterbatasan Anggaran	1. Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Kegiatan Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. 2. Menurunnya semangat berkarya dan mengabdikan diri para kader, sulitnya para kader bertukar informasi dan saling bersilaturahmi sesama kader	5	3	15	Sedang	1. Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun:	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	1. Kader 2. Kader Posyandu
					2	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	2. Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	2. Memberikan pembinaan kepada Staf:	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi
					3	Pemahaman terhadap proses pengadaan barang dan jasa belum optimal	3. Kurangnya pemahaman terhadap proses pengadaan	C	Keterlambatan proses pengadaan barang sehingga terlambat sampai kepada masyarakat.	2	4	8	Rendah	3. Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	4	Mengikutsertakan Staf dalam Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	2020	Kasi dan staf
					4	Metode kegiatan jambore yang digunakan kurang inovatif dan menarik	4. Kurangnya pemahaman SDM terkait isu terbaru dan metode perlombaan dan kegiatan yang menarik	C	Metode dan materi kegiatan yang dilakukan kurang menarik dan menyebabkan kebosanan	4	3	12	Sedang	4. Menggali ide dan kreatifitas dan melibatkan pihak ketiga untuk metode yang kurang dikuasai	3	Menggunakan jasa pihak luar untuk metode yang dipilih dan belum dikuasai	2020	Kader dan masyarakat
			Kelas Ibu Hamil Dilingkungan OPD Provinsi Kepulauan Riau	Bertujuan untuk penyebaran informasi kepada seluruh ibu hamil & ibu balita di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Perihal Perawatan Pada Masa Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Perawatan Bayi Baru Lahir, agar Seluruh Ibu Hamil Dilingkungan OPD Provinsi Kepri selalu sehat dan melahirkan dengan selamat	1	Terdapat Resiko Kurangnya Partisipasi Ibu Hamil & Ibu Balita Dalam Mengikuti Kelas Ibu Hamil	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	3	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2. Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	3	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Kurangnya kesadaran ibu hamil dan ibu balita dalam mengikuti kelas ibu hamil dikarenakan kurang terpaparnya informasi terhadap pelaksanaan kelas ibu hamil di lingkungan OPD Provinsi Kepulauan Riau	C	4. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil tidak maksimal	3	3	9	Sedang	4. Melakukan penyebaran informasi secara maksimal dengan cara sweeping bumil ke OPD Dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau	3	Sosialisasi jadwal kelas ibu hamil	2020	Ibu Hamil
			Bantuan Operasional Kesehatan	Terlaksananya Kunjungan Keluarga Sehat Total Covarage		Keterbatasan anggaran dan SDM	anggaran dan SDM terbatas	UC	tidak terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan	4	4	16	Sedang	merencanakan dan membuat jadwal kegiatan	3	Usulan anggaran sesuai renstra dan pertimbangan kebutuhan sesuai target output	2020	Kabid

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	CUC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
				Mencegah penularan HIV AIDS di Provinsi Kepulauan Riau	4	Ketersediaan anggaran kas	Kebijakan penganggaran	UC	Tidak terpenuhinya sasaran kegiatan	3	4	12	Sedang	penyediaan anggaran yg cukup sesuai dokumen anggaran dan anggaran kas	3	Menentukan prioritas penganggaran kegiatan	2020	Kabid
			Orientasi PKPR dan Peer Conselor	Bertujuan untuk penyebaran informasi kepada seluruh pengelola program remaja dan siswa (kader remaja) terkait pelaksanaan kegiatan PKPR di sekolah dan kedepannya dapat menjadi kader posyandu remaja di wilayah tempat tinggalnya		Terdapat Resiko Kurangnya Partisipasi remaja dalam mendukung program PKPR dan Posyandu Remaja	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	4	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2. Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	3	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Kurangnya kesadaran remaja untuk terlibat menjadi peerkonselor di sekolah (kader remaja) dikarenakan kurang terorientasinya pelaksanaan program PKPR di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	C	4. tidak terlaksananya Orientasi PKPR & Peer Konselor	3	3	9	Sedang	Melibatkan guru/sekolah atau duta peer conselor di sekolah	4	Kerjasama lintas sektor	2020	Sekolah dan Puskesmas
			Pengadaan Taburia Dalam Rangka Penurunan Stunting	Menurunkan Cakupan Balita Under Weight	2	Terdapat Resiko Kurang Maksimalnya Pengadaan Taburia	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	3	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2. Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	3	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	3	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Ketersedian Pengadaan Taburia kurang maksimal	C	4. Kurangnya pemanfaatan Taburia oleh Balita Underweight	3	3	9	Sedang	4. Melakukan Pemantauan konsumsi taburia	4	Monitoring pelaksanaan pelacakan kasus gibur	2020	Balita Underweight
			Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK	Terlaksananya kegiatan pengadaan PMT Bumil KEK Tahun 2020	1	Terdapat Resiko Kurang Maksimalnya Pengadaan PMT Bumil KEK	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	3	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2. Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	3	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	3	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Ketersedian PMT Bumil KEK kurang maksimal	C	4. Kurangnya minat dalam konsumsi PMT pada BUMIL KEK	3	3	9	Sedang	4. Melakukan pemantauan konsumsi PMT kasus	4	Kerjasama bersama RT/Puskesmas setempat	2020	Bumil KEK
			Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus	Terlaksananya kegiatan pengadaan PMT Balita Tahun 2020	2	Terdapat Resiko Kurang Maksimalnya Pengadaan PMT Balita	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	4	1. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2. Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	4	2. Peningkatan kompetensi tenaga PKM dan Dinkes	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Kurangnya minat dalam konsumsi PMT pada Balita Kurus	C	4. Tidak terlaksananya penanggulangan gibur secara efektif	3	3	9	Sedang	4. Melakukan pemantauan konsumsi PMT kasus	4	Kerjasama dengan RT/Puskesmas setempat, membuat variasi menu PMT Lokal	2020	Balita Underweight
			Pelacakan Kasus Gizi Buruk	Menurunkan prevalensi wasting dan underweight	2	Terdapat Resiko Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Pelacakan Gizi Buruk Di Provinsi Kepulauan Riau	1. Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	4	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2.Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	4	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Ketersediaan Anggaran pelacakan kasus gizi buruk	C	4. Kurangnya penyerapan realisasi anggaran pelacakan kasus gizi buruk	3	3	9	Sedang	4. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	4.Review Kinerja Instansi	2020	Kasi
		Asuhan Persalinan Normal Melalui P2KS Provinsi Kepri	Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam melakukan tindakan Asuhan Persalinan Normal Terhadap Ibu Bersalin	1	Terdapat Resiko Kurangnya pemahaman bidan terkait praktik pelaksanaan APN	1.Kurangnya Kesiapan SDM	C	1. Terhambatnya pencapaian tujuan organisasi	3	3	9	Sedang	1. Pembinaan Kesiapan SDM	4	1. Penguatan Kebijakan dan Manajemen Keuangan	2020	Kasi	
							2. Koordinasi & Komunikasi Yang Belum Efektif	C	2. Tidak Optimalnya Layanan	3	3	9	Sedang	2.Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi	4	2. Pemenuhan SDM Yang Kompeten	2020	Kasi dan staf
							3. Tidak Optimalnya Proses Pemantauan Kegiatan	C	3. Reputasi organisasi terancam	3	3	9	Sedang	3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan	4	3. Optimalisasi Penerapan SOP	2020	Kasi
							4. Kurangnya partisipasi bidan dalam mengikuti kegiatan APN	C	4. Realisasi anggaran pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal Tidak Maksimal	3	3	9	Sedang	4. Melakukan penyebaran informasi secara maksimal dengan cara menghimbau Dinas Kesehatan kabupaten / kota untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan APN	4	Penyebaran Informasi pelatihan APN ke Kab/Kota	2020	Bidan
		Pemantauan & Evaluasi kegiatan Kabupaten/Kota Sehat	1. Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan tim Pembina Provinsi dalam pembinaan dan penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2. Meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan tim Pembina dan forum Kabupaten/Kota sehat dalam mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.	1	Pemahaman terhadap proses penyusunan Dokumen penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat belum optimal	Kurangnya pemahaman terhadap proses pelaksanaan	C	Tidak maksimalnya kinerja dalam penyusunan dokumen penyelenggaraan KKS Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten Kota untuk diikutsertakan dalam mengikuti seleksi di Tingkat Nasional	3	3	9	Sedang	Berkoordinasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait	4	Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pimpinan dan Lintas sektor	2020	Kepala OPD	
							2. Ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi	UC	Tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat -Tidak terlaksananya proses penilaian dan verifikasi KKS Tingkat Provinsi	5	4	20	Tinggi	Menjadikan kegiatan KKS ini menjadi kegiatan prioritas	3	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga pembinaan dan penilaian Kabupaten Kota Sehat bisa secara menyeluruh	2020	1. Kabid 2. Kasi
2	PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Bakti Sosial	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dasar dan skrining penyakit tidak menular, sunatan massal dan donor darah	1	Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak terpenuhi.	Banyaknya permohonan bantuan bakti sosial dari pihak luar	UC	Pelayanan Kesehatan pemeriksaan skrining penyakit tidak menular, sunatan massal, donor darah tidak terpenuhi.	3	4	12	Sedang	Bekerjasama dengan seksi PTM	5	Membuat Prioritas Bantuan yang akan di berikan dalam rangka bakti sosial	2020	Organisasi Pengusul Baksos

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
			Fasilitasi Penunjang Program Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya fasilitasi kegiatan akreditasi puskesmas dalam rangka peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkesinambungan di Puskesmas	1	Fasilitas tidak terlaksana	- ketersediaan surveyor Akreditasi - Kesiapan Puskesmas yang akan dilakukan penilaian akreditasi	UC	Fasilitas tidak terlaksana, hasil akreditasi tidak maksimal	4	4	16	Sedang	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab akreditasi dan pendamping akreditasi Puskesmas	4	Pelaksanaan pendampingan akreditasi Puskesmas dimulai sejak awal tahun, apabila memungkinkan penilaian survey tahun berikutnya.	2020	Puskesmas
			Pertemuan kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) di FKTP	Terselenggaranya pertemuan kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) di FKTP	1	Tidak terselenggaranya pertemuan kalibrasi sarana prasarana alat (SPA) di FKTP	Efisiensi Anggaran	C	Realisasi Anggaran tidak maksimal	3	3	9	Sedang	Dilaksanakan sesuai dengan anggaran kan yang telah disusun	5	Melakukan evaluasi penyerapan anggaran berkala	2020	Kasi
			Penyelenggaraan Badan Pengawas RS (BPRS) Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Kab/Kota yang memiliki RS tersertifikasi Akreditas	1	Keterbatasan Anggaran	Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya pengawasan yang menyeluruh ke semua RS Kab/Kota di Provinsi Kepri 2. Masyarakat tidak mendapatkan perlindungan atas keluhan yang bersifat safety patient di RS 3. Rumah Sakit merasa kurang terlindungi atas pengaduan dan ancaman dari pihak luar (wartawan, LSM, dan lainnya)	5	3	15	Sedang	Penyusunan anggaran kas dengan cermat	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga pengawasan RS bisa menyeluruh	2020	Tim BPRS, Rumah Sakit dan Masyarakat
			Pendampingan Survei Akreditasi Rumah Sakit	Persentase Kab/Kota yang memiliki RS tersertifikasi Akreditas	1	Keterbatasan Anggaran	Efisiensi Anggaran	UC	1. Tidak terlaksananya Akreditasi maupun Re-akreditasi RS 2. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai SOP 3. Rumah sakit tidak dapat bekerjasama dengan BPJS 4. Rumah sakit belum terjamin mutu pelayanannya	4	3	12	Sedang	Penyusunan anggaran kas dengan cermat	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga Dinas Kesehatan mampu melakukan pemantauan, kordinasi dan advokasi dengan Dinas Kesehatan Kab/kota guna percepatan akreditasi rumah sakit	2020	1. Dinas Kesehatan Provinsi Kepri 2. Dinas Kesehatan Kab/Kota 3. Rumah Sakit 4. Masyarakat
			Kontigensi Terpadu Krisis Kesehatan	Persentase Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1	Keterbatasan Anggaran	Efisiensi Anggaran	UC	1. Penanganan dampak bencana di daerah tidak maksimal 2. Optimalisasi Koordinasi Lintas program/ lintas sektor tidak berjalan dengan baik	3	3	9	Sedang	Kerjasama lintas sektor dan	4	Penerbitan SK Lintas OPD atas Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	2020	1. Kabid 2. Masyarakat di wilayah risiko tinggi bencana
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dan atau Pengadaan Alat Kesehatan RSUD/RS Jiwa	Tersedianya sarana prasarana alat kesehatan RSUD/RS Jiwa	1	keterbatasan anggaran	terjadi efisiensi anggaran	UC	tidak terpenuhi sarana prasarana alat kesehatan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, tidak terpenuhinya mutu pelayanan	4	4	16	Sedang	penyediaan anggaran yg cukup sesuai dokumen anggaran dan anggaran kas	2	Pengusulan anggaran kegiatan sesuai renstra	2020	Kepala OPD
					2	keterlambatan mulai nya pekerjaan	administrasi	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	4	2	8	Rendah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala		peningkatan kapasitas sdm	2020	Kepala OPD

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
					3	keterlambatan proses lelang pengadaan	perubahan regulasi pengadaan, kurangnya pemahaman SDM, Ipse,	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	4	2	8	Rendah	pemantauan ketat thd waktu persiapan pengadaan	4	peningkatan kapasitas sdm	2020	Kepala OPD
					4	keterlambatan penyelesaian pekerjaan	faktor cuaca, manajemen proyek yang tidak baik	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	5	3	15	Sedang	pemantauan ketat thd pekerjaan di lapangan dan time schedule, mencari penyedia lain	4	Monitoring pekerjaan fisik berkala	2020	Kepala OPD, Penyedia, Masyarakat
			Sarana Prasarana Alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas	1	keterbatasan anggaran	terjadi efisiensi anggaran	UC	tidak terpenuhi sarana pelayanan kesehatan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, tidak terpenuhinya mutu pelayanan	4	4	16	Sedang	penyediaan anggaran yang cukup sesuai kebutuhan dan anggaran kas	2	Pengusulan anggaran kegiatan sesuai renstra	2020	Kepala OPD
					2	keterlambatan mulai nya pekerjaan	administrasi	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	4	2	8	Rendah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala	4	peningkatan kapasitas SDM	2020	Kepala OPD
					3	keterlambatan proses lelang pengadaan	perubahan regulasi pengadaan, kurangnya pemahaman SDM, Ipse, sirup	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	4	2	8	Rendah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala	4	peningkatan kapasitas SDM	2020	Kepala OPD
					4	keterlambatan penyelesaian pekerjaan	faktor cuaca, manajemen proyek yang tidak baik	UC	pekerjaan tidak selesai tepat waktu	5	3	15	Sedang	pemantauan ketat thd pelaksanaan kontrak	4	Monitoring pekerjaan fisik berkala	2020	Kepala OPD
			Pengelolaan Jamkesda Provinsi Kepulauan Riau (hibah)	Terpenuhinya Pengelolaan Jaminan Pelayanan Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau	1	keterlambatan pencairan anggaran	anggaran tidak tersedia di kas daerah	UC	masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kesakitan, terlanggarnya PKS antara R.S dan Dinkes	5	4	20	Tinggi	Penyediaan anggaran sesuai dokumen anggaran, ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas, negosiasi waktu pembayaran dengan R.S	4	Koordinasi dengan BPKAD	2020	Kepala OPD
					2	jumlah pasien meningkat	belum semua penduduk menjadi peserta BPJS	UC	masyarakat yang dapat dilayani jamkesda terbatas	5	4	20	Tinggi	meningkatkan jumlah anggaran jamkesda	4	advokasi kpd TAPD utk meningkatkan anggaran jamkesda	2020	Kepala OPD
			Pengelolaan Jaminan Pelayanan Penduduk Miskin	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dg R.S dan monitoring evaluasi Program Jamkesda dan JKN	1	Keterlambatan pencairan anggaran	anggaran tidak tersedia di kas daerah	UC	masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kesakitan, terlanggarnya PKS antara R.S dan Dinkes	5	3	15	Sedang	Penyediaan anggaran sesuai dokumen anggaran, ketersediaan anggaran sesuai anggaran kas, negosiasi waktu pembayaran dengan R.S	4	Koordinasi dengan BPKAD	2020	Kepala OPD
							keterlambatan penandatanganan kerjasama dgn RS dan movev Jamkesda dan JKN	C	Terkendalanya manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	5	2	10	Sedang	Koordinasi dan pembayaran klaim Jamkesda di RS tepat waktu	4	Koordinasi dengan RS yang bekerjasama dengan Jamkesda Prov Kepri	2020	Kepala OPD, Masyarakat
			Pelayanan Kesehatan Aparatur	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Aparatur di klinik dan terlaksananya supporting P3K pada event-event tertentu	1	Obat-obatan tidak mencukupi, Supporting tenaga tidak terpenuhi	Anggaran pembelian obat terbatas. Tenaga yang tersedia terbatas, permintaan bantuan tenaga P3K banyak.	C	Pelayanan Kesehatan Aparatur terganggu	3	3	9	Sedang	Meminta bantuan obat kepada Intalasi Farmasi. Meminta bantuan tenaga kepada RSUD RAT dan Dinas Kesehatan Kabkota.	5	Penambahan Anggaran Pembelian Obat	2020	Aparatur
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dengan Metode Pendekatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Terlaksananya pembinaan dan peningkatan layanan kesehatan tradisional bagi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di kabupaten/kota	1	keterbatasan anggaran	terjadi efisiensi anggaran	UC	Tidak terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4	4	16	Sedang	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun.	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	Kasi
				2. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	2	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	peserta tidak datang / peserta yang datang sedikit	UC	Anggaran Tidak terserap maksimal	4	2	8	Rendah	Koordinasi dengan Dinkes kab/kota, puskesmas dan RS terkait kehadiran	3	Segera mengganti peserta ke instansi yang lain	2020	Kasi

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
				3. Jumlah kumulatif Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang berintegrasi dengan kesehatan tradisional	3	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	peserta tidak datang / peserta yang datang sedikit	C	Peserta tidak memenuhi kuota	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan Dinkes kab/kota, puskesmas dan RS terkait kehadiran peserta	4	Segera mengganti peserta ke instansi yang lain	2020	Kasi
					4	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	narasumber tidak datang	C	penyampaian informasi terhambat	3	2	6	Rendah	Koordinasi dengan narasumber perihal kesiapan dan kedatangan dari jauh hari sebelum pelaksanaan	3	Segera mengirim permintaan untuk penggantian narasumber	2020	Kasi
					5	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	Memberikan pembinaan kepada Staf	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi
			Penyelenggaraan SP3T (Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional) Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya kegiatan pertemuan SP3T di Provinsi Kepulauan Riau	1	keterbatasan anggaran	terjadi efisiensi anggaran	UC	Tidak terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	4	4	16	Sedang	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun:	4	Penyusunan anggaran kas dengan cermat sehingga proses pencairan tidak di akhir tahun	2020	Kasi
				Terlaksananya kabupaten/kota yang bekerja sama dengan SP3T	2	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	peserta tidak datang / peserta yang datang sedikit	UC	Anggaran Tidak terserap maksimal	4	2	8	Rendah	Koordinasi dengan Dinkes kab/kota, puskesmas dan RS terkait kehadiran peserta	3	Segera mengganti peserta ke instansi yang lain	2020	Kasi
				Terlaksananya pelayanan kesehatan tradisional khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dengan metode, sarana, alat dan bahan/ obat tradisional dan penyehat tradisional yang sesuai dengan kaidah dan mengutamakan keamanan manfaat dan mutu	3	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	peserta tidak datang / peserta yang datang sedikit	C	Peserta tidak memenuhi kuota	4	3	12	Sedang	Koordinasi dengan Dinkes kab/kota, puskesmas dan RS terkait kehadiran peserta	4	Segera mengganti peserta ke instansi yang lain	2020	Kasi
					4	terganggunya pelaksanaan kegiatan / tidak terlaksananya kegiatan	narasumber tidak datang	C	penyampaian informasi terhambat	3	2	6	Rendah	Koordinasi dengan narasumber perihal kesiapan dan kedatangan dari jauh hari sebelum	3	Segera mengirim permintaan untuk penggantian narasumber	2020	Kasi
					5	Pengadministrasian kegiatan yang kompleks	Administrasi sering tidak lengkap sehingga menghambat proses pengajuan anggaran	C	Anggaran tidak tersedia pada saat kegiatan akan dilaksanakan	3	3	9	Sedang	Memberikan pembinaan kepada Staf	4	Usulan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kompetensi Jabatan Staf Pelaksana dan Jabatan Fungsional	2020	Kasi
3	Program Kefarmasian dan alat Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (buffer) di pelayanan kesehatan dasar	1	Tidak tersedianya anggaran	Anggaran Pemda terbatas/efisiensi anggaran	C	Tidak terpenuhinya obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	5	2	10	Sedang	Menjadikan kegiatan ini sebagai prioritas	4	Melakukan advokasi kepada pimpinan serta lintas sektor	2020	Kasi
					2	Keterlambatan melakukan proses pengadaan	Perubahan regulasi/peraturan	C	Beberapa kebutuhan item obat tidak dapat disediakan	3	1	3	Rendah	menetapkan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu	4	Melakukan rapat dengan tim pengadaan untuk menetapkan jadwal yang tepat untuk melakukan pengadaan	2020	Kasi
					3	Tidak terpenuhinya obat yang dibutuhkan	Sistem pengadaan obat yang belum optimal	UC	Pelayanan kefarmasian di sarana kesehatan menjadi terganggu	4	5	20	Tinggi	Melakukan indentifikasi permasalahan terkait sistem pengadaan	4	Melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk pemecahan permasalahan yang ada	2020	Kepala OPD
					4	Penyediaan obat tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Pihak penyedia lambat dalam memberikan respon kesiapan melayani permintaan kebutuhan obat	C	Fungsi sebagai buffer stock provinsi tidak optimal	4	5	20	Tinggi	Meminta kepada penyedia untuk cepat memberikan respon terhadap pemesanan item obat	4	Setelah memilih item obat untuk dipesan, segera lakukan komunikasi yang efektif ; Mencari penyedia lain	2020	Kepala OPD
			Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	Persentase produk farmasi di Peredaran yang memenuhi syarat	1	Ketersediaan anggaran yang dialokasikan sangat kecil	Anggaran Pemda terbatas/efisiensi anggaran	C	Terdapat beberapa obat yang beredar tidak memenuhi persyaratan	4	3	12	Sedang	Melakukan advokasi kepada pimpinan agar menambahkan anggaran yang sudah ada	3	Membuat laporan data terkait sarana produksi dan distribusi farmasi	2020	Kabid

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
					2	Kurang kooperatifnya sarana Produsen dan Distributor yang akan dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pihak Produsen dan Distributor tidak memahami aturan yang berlaku	UC	Terdapat beberapa obat yang beredar tidak memenuhi persyaratan	4	3	12	Sedang	Meminta kepada produsen dan distributor untuk dapat memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku	4	Melakukan sosialisasi terkait peraturan secara berkala dan efektif	2020	Kepala OPD
			Pengelolaan Instalasi Farmasi Provinsi Kepulauan Riau	Persentase ketersediaan obat dipelayanan kesehatan dasar	1	Tidak tersedianya anggaran	Anggaran Pemda terbatas/efisiensi anggaran	C	Terganggunanya Tata Kelola Obat dan Perbekkes buffer di instalasi farmasi provinsi	4	3	12	Sedang	Menjadikan kegiatan ini sebagai prioritas	4	Melakukan advokasi kepada pimpinan serta lintas sektor	2020	Kabid
			Distribusi Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dipelayanan kesehatan dasar	1	Biaya distribusi obat dan pembekalan kesehatan yang terbatas	Anggaran Pemda terbatas/efisiensi anggaran	C	Terhambatnya ketersediaan beberapa item obat di fasilitas pelayanan kesehatan	4	3	12	Sedang	Melakukan advokasi kepada pimpinan agar menambahkan anggaran yang sudah ada	3	Membuat laporan data terkait jumlah biaya yang dibelanjakan untuk pengiriman obat dan pembekalan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kab./Kota se-Provinsi Kepri	2020	1. Kepala OPD 2. Puskesmas
4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Pengangkatan Tenaga Paramedis Non PNS	Terpenuhinya kebutuhan tenaga Paramedis di Kabupaten/Kota		Keterbatasan tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan	Pendistribusian tidak merata	UC	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak optimal	4	3	12	Sedang	Pemetaan fasyankes prioritas untuk pengangkatan tenaga paramedis	4	Advokasi dan bimtek ke Dinkes Kab/kota untuk pemetaan pendistribusian tenaga paramedis	2020	Kepala OPD
						keterbatasan anggaran	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi	UC	Usulan kebutuhan tenaga paramedis dari kab/kota atau fasyankes lainnya tidak dapat terpenuhi	4	3	12	Sedang	Pemetaan fasyankes prioritas untuk pengangkatan tenaga paramedis	4	Pengusulan pemenuhan tenaga paramedis ke kementerian melalui program Nusantara Sehat	2020	Kabid
			Pengangkatan Tenaga Medis Non PNS	Terpenuhinya kebutuhan tenaga Medis di Kabupaten/Kota		Keterbatasan tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan	Pendistribusian tidak merata	UC	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak optimal	4	3	12	Sedang	Pemetaan fasyankes prioritas untuk pengangkatan tenaga Medis	4	Advokasi dan bimtek ke Dinkes Kab/kota untuk pemetaan pendistribusian tenaga medis	2020	Kepala OPD
						keterbatasan anggaran	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi	UC	Usulan kebutuhan tenaga medis dari kab/kota atau fasyankes lainnya tidak dapat terpenuhi	4	3	12	Sedang	Pemetaan fasyankes prioritas untuk pengangkatan tenaga Medis	4	Pengusulan pemenuhan tenaga paramedis ke kementerian melalui program Nusantara Sehat	2020	Kabid
			Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	Tersertifikasinya kompetensi pejabat fungsional kesehatan		Tertundanya kenaikan jenjang jabatan Pejabat fungsional kesehatan	Rekomendasi yang belum diberikan oleh Unit Pembina Jabatan fungsional di Kemenkes, Tim Penguji tidak tersedia di daerah	UC	Menurunnya motivasi kerja pejabat fungsional kesehatan	4	3	12	Sedang	- Berkoordinasi dengan Unit Pembina dalam pengajuan proposal dan penerbitan rekomendasi - Berkoordinasi dengan Kemenkes/Dinas kesehatan terdekat untuk peminjaman tim penguji atau menumpang untuk uji kompetensi	4	- Pendataan Pejabat Fungsional kesehatan yang akan uji kompetensi - Pengajuan penilaian uji kompetensi ke Unit Pembina bagi jabatan yang tidak tersedia Tim Penguji di daerah	2020	1. Kepala OPD 2. Pejabat fungsional kesehatan
						Tertundanya pengangkatan ke dalam jabatan fungsional kesehatan	Rekomendasi dan petunjuk teknis yang belum diberikan oleh Unit Pembina Jabatan fungsional di Kemenkes, Tim Penguji tidak tersedia di daerah	UC	Menurunnya motivasi kerja pejabat fungsional kesehatan	4	3	12	Sedang	- Berkoordinasi dengan Unit Pembina dalam pengajuan proposal dan Petunjuk teknis untuk uji kompetensi - Berkoordinasi dengan Dinas kesehatan terdekat untuk peminjaman tim penguji atau menumpang untuk uji kompetensi	4	- Pendataan Pejabat Fungsional kesehatan yang akan uji kompetensi - Menyurati Unit Pembina untuk permintaan Petunjuk Teknis uji kompetensi - Pengajuan penilaian uji kompetensi ke Unit Pembina bagi jabatan yang tidak tersedia Tim Penguji di daerah	2020	1. Kepala OPD 2. Pejabat fungsional kesehatan

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
			Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Terseleksi tenaga kesehatan teladan di puskesmas Tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan Provinsi untuk mengikuti seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional		Adanya kabupaten/kota yang tidak mengusulkan perwakilan dalam seleksi tenaga kesehatan teladan di tingkat provinsi	Ketiadaan anggaran untuk seleksi tenaga kesehatan teladan di tingkat kabupaten/kota	UC	Ketiadaan usulan peserta seleksi tenaga kesehatan teladan untuk tingkat Nasional dari Provinsi Kepulauan Riau	4	3	12	Sedang	- Berkoordinasi dengan Kemenkes akan agenda seleksi tenaga kesehatan teladan di puskesmas	4	- Berkoordinasi dengan Kemenkes untuk penerbitan lebih awal surat edaran dari Pusat ke Daerah sebagai dasar Dinas Kesehatan Provinsi dalam membuat surat edaran ke Kabupaten/Kota - Mensosialisasikan kegiatan seleksi tenaga kesehatan teladan puskesmas ke tingkat dinkes kab/kota dan puskesmas untuk seleksi nakes teladan di tingkat puskesmas dan kab/kota	2020	Kepala OPD
			Insentif Peserta Internship Provinsi Kepulauan Riau	Terselenggaranya program internship dokter Indonesia wilayah penugasan Provinsi Kepulauan Riau secara optimal dalam rangka pemandirian dan pemahiran serta pendayagunaan dokter		Keterbatasan anggaran	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi	UC	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program internship dokter di wahana tidak dapat mencakup seluruh wahana yang ada	4	3	12	Sedang	Berkoordinasi dengan Dinkes Kab/kota, pimpinan dan dokter pendamping dalam monitoring dan evaluasi peserta dokter internship	4	- Berkoordinasi dengan Kemenkes/KIDI Pusat terkait kebijakan dalam program internship dokter - berkoordinasi dengan Kemenkes dalam pengajuan usulan kegiatan movev dengan dukungan APBN	2020	Kabid
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Penanggulangan Penyakit Menular dan Berpotensi Wabah	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Menular dan Berpotensi KLB	1	- Keterbatasan Anggaran	- Pemotongan Anggaran	C	- Kurang maksimal dalam penanggulangan wabah dan KLB	5	3	15	Sedang	- Pengusulan anggaran di TW I	4	- Program Prioritas	2020	Kabid
					2	- Tertular penyakit berpotensi wabah	- Kurang nya pemahaman masyarakat tentang dampak penyakit menular yang ada.	UC	Perawatan dan pengobatan	4	3	12	Sedang	- Penggunaan APD , Pemberian vaksinasi, Meningkatkan keterlibatan LS dlm sosialisasi.	4	- Meningkatkan peran LS dalam pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi wabah.	2020	Tim Investigasi Wabah
			Penanggulangan PD3i	Terpenuhinya Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan IDL, BATITA, BIAS dan WUS	1	- Keterbatasan Anggaran	- Pemotongan Anggaran	C	Kurang maksimal dalam pencapaian IDL, BATITA, BIAS dan WUS	4	4	16	Sedang	- Pengusulan anggaran di TW I	4	- Program Prioritas	2020	Kabid
					2	Tertular penyakit PD3i	- Penolakan Imunisasi	UC	Perawatan dan pengobatan	4	3	12	Sedang	- Penggunaan APD , Pemberian vaksinasi, Meningkatkan keterlibatan LS dlm sosialisasi.	5	- Meningkatkan capaian IDL, BATITA, BIAS untuk terbentuk nya Herd Immunity	2020	Tim PD3i
			Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di Embarkasi Batam	Terlaksana pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji	1	Jemaah Haji yang tidak ISTITIAH	Jemaah haji dengan penyakit penyerta	UC	Perawatan, pengobatan dan penundaan	5	3	15	Sedang	Pemeriksaan kesehatan saat masa tunggu, vaksinasi, pola hidup sehat	5	Meningkatkan Koordinasi dengan kemenag	2020	Jemaah Haji
			Pencegahan dan pengendalian kasus kusta di kab/kota Provinsi Kepulauan Riau	Tercapainya pencegahan dan pengendalian penyakit kasus kusta di prov kepulauan Riau	1	Ketidakhadiran Narasumber	padatnya jadwal narasumber	UC	Informasi Terupdate tidak tersampaikan ke peserta kegiatan	2	2	4	Rendah	merencanakan dan membuat jadwal kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan pusat	3	koordinasi jadwal narasumber sejak awal tahun melalui surat resmi	2020	Kasi
			Pengendalian Pencegahan Peningkatan Kasus DBD/Malaria di Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya survey vektor, breeding place DBD dan malaria di Kab/Kota Se-Provinsi Kepri	1	Ketidaktepatan waktu pengadaan	Kebijakan pengadaan	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan alat Fogging di Kota Batam	3	4	12	Sedang	pemantauan ketat thd pelaksanaan kontrak	3	Koordinasi dengan Tim Pengadaan di Kota Batam	2020	Kasi
			Penanggulangan dan Pengendalian PTM	Tercapainya penanggulangan dan pengendalian PTM	1	Ketersediaan anggaran kas	Kebijakan penganggaran	UC	Tidak terpenuhinya sasaran kegiatan	3	4	12	Sedang	penyediaan anggaran yg cukup sesuai dokumen anggaran dan anggaran kas	3	Menentukan prioritas penganggaran kegiatan	2020	Kabid
					2	Ketidaktepatan waktu pengadaan	Kebijakan pengadaan	UC	Tidak terpenuhinya alat-alat deteksi dini faktor risiko PTM	3	4	12	Sedang	pemantauan ketat thd pelaksanaan kontrak	3	peningkatan kapasitas sdm	2020	Kasi

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
6	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dinas kesehatan	Pertemuan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Menghasilkan dokumen perencanaan dan anggaran	1	Ketidakhadiran Narasumber	padatnya jadwal narasumber	UC	informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran tidak dapat diterima oleh peserta	2	3	6	Rendah	melakukan penjadwalan ulang kegiatan materi pusat tetap dikirimkan ke panitia daerah sehingga informasi tidak terputus	4	koordinasi jadwal narasumber sejak awal tahun melalui surat resmi	2020	Kasubbag
					2	Kehadiran peserta tidak lengkap	jadwal pesawat, bertepatan dengan acara penting di daerah, keterbatasan SDM perencanaan di daerah	UC	informasi terputus karena ketidakhadiran peserta	1	2	2	Rendah	melakukan konfirmasi peserta sejak jauh hari, minimal 5 hari sebelumnya. jika terdapat peserta yang berhalangan hadir, dilakukan redistribusi	4	Info rencana kegiatan 1 bulan sebelum pelaksanaan	2020	Kasubbag
			Peningkatan Sinkronisasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Asistensi Pembangunan Kesehatan	Terlaksananya sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan asistensi pembangunan kesehatan tingkat Provinsi Kepulauan Riau	1	Efisiensi Anggaran	Keterbatasan Anggaran	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan	2	3	6	Rendah	Penyediaan Anggaran yang cukup sesuai Dokumen Anggaran dan Anggaran Kas	3	Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	2020	Ka. Sekretariat
					2	Usulan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota tidak lengkap	pengiriman usulan dari Kab/kota terlambat, data dukung yang menjadi prasyarat usulan tidak lengkap	C	Tidak tertampungnya usulan Kabupaten/Kota bersumber APBD I, tidak adanya keselarasan program/kegiatan antar Kab/Kota	4	3	12	Sedang	Melakukan follow-up berkala hingga batas deadline, melakukan koordinasi bersama Kab/Kota agar melengkapi data dukung dan syarat pengajuan Program/Kegiatan	3	Koordinasi Kabupaten/Kota	2020	Ka. OPD, Dinkes/RSUD Prov/Kab/Kota
					3	Terkendalanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kab/Kota	Cuaca	UC	Tidak terpantau secara langsung pembangunan dan pemetaan sarana prasarana fasyankes di Kabupaten/Kota	3	3	9	Sedang	Monitoring yang dilakukan pada Kab/Kota dengan kondisi cuaca ekstrem seperti di Lingga, Natuna dan Anambas harus dijadwalkan pada awal tahun saat gelombang tidak tinggi/bukan musim hujan	3	Mengoptimalkan rencana jadwal kegiatan	2020	Kasubbag
			Sosialisasi Juknis dan Penyusunan RKA DAK	Terlaksananya Pra-Rapat Koordinasi Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)	1	Ketidakhadiran Narasumber	padatnya jadwal narasumber	C	informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran tidak dapat diterima oleh peserta	3	3	9	Sedang	melakukan penjadwalan ulang kegiatan materi pusat tetap dikirimkan ke panitia daerah sehingga informasi tidak terputus	4	koordinasi jadwal narasumber sejak awal tahun melalui surat resmi	2020	Kasubbag
					2	Kehadiran peserta tidak lengkap	jadwal pesawat, bertepatan dengan acara penting di daerah, keterbatasan SDM perencanaan di daerah	C	informasi terputus karena ketidakhadiran peserta	2	2	4	Rendah	melakukan konfirmasi peserta sejak jauh hari, minimal 5 hari sebelumnya. jika terdapat peserta yang berhalangan hadir, dilakukan redistribusi	4	Info rencana kegiatan 1 bulan sebelum pelaksanaan	2020	Kasubbag
					3	Usulan DAK Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota tidak lengkap	pengiriman usulan dari Kab/kota terlambat, data dukung yang menjadi prasyarat usulan tidak lengkap, usulan belum dientry pada aplikasi KRISNA, usulan PBE ditolak	C	Tidak tertampungnya usulan DAK Kabupaten/Kota	5	3	15	Sedang	Melakukan follow-up berkala hingga batas deadline, melakukan koordinasi bersama Kab/Kota agar melengkapi data dukung dan syarat pengajuan DAK	4	Koordinasi Kabupaten/Kota	2020	Ka. OPD, Dinkes/RSUD Prov/Kab/Kota
			Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	Terseleenggaranya penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1	Efisiensi Anggaran	Keterbatasan Anggaran	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan	2	3	6	Rendah	Penyediaan Anggaran yang cukup sesuai Dokumen Anggaran dan Anggaran Kas	3	Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	2020	Ka. Sekretariat

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
			Review Standar Operasional Pelayanan(SOP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Terseleenggaranya Review Standar Operasional Pelayanan(SOP) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2	Efisiensi Anggaran	Keterbatasan Anggaran	UC	Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai waktu yang telah di tentukan	2	3	6	Rendah	Penyediaan Anggaran yang cukup sesuai Dokumen Anggaran dan Anggaran Kas	3	Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal		Ka. Sekretariat
7	Program Pengembangan Data dan Informasi	Menyediakan publikasi data dan informasi kesehatan.	Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Kepri	Terbitnya Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebagai gambaran derajat kesehatan masyarakat	1	Ketidakhadiran Narasumber	padatnya jadwal narasumber	C	informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran tidak dapat diterima oleh peserta	2	3	6	Rendah	melakukan penjadwalan ulang kegiatan materi pusat tetap dikirimkan ke panitia daerah sehingga informasi tidak terputus	4	koordinasi jadwal narasumber sejak awal tahun melalui surat resmi	2020	Kasubbag
					2	Kehadiran peserta tidak lengkap	jadwal pesawat, bertepatan dengan acara penting di daerah, keterbatasan SDM data/informasi di daerah	C	informasi terputus karena ketidakhadiran peserta	2	2	4	Rendah	melakukan konfirmasi peserta sejak jauh hari, minimal 5 hari sebelumnya, jika terdapat peserta yang berhalangan hadir, dilakukan redisposisi	4	Info rencana kegiatan 1 bulan sebelum pelaksanaan	2020	Kasubbag
					3	Data Lampiran Profil Tidak Lengkap	Keterlambatan pemutakhiran data profil kesehatan di Kabupaten/Kota, RS Swasta belum menyerahkan data	C	Jadwal penerbitan profil kesehatan tidak tepat waktu	3	3	9	Sedang	Melakukan updating data berkala tiap semester, membatasi revisi data Kab/Kota sehingga analisis dapat dilakukan sesuai jadwal	3	melakukan feedback keterisian data profil kesehatan Kab/Kota	2020	Ka. OPD, Dinkes /Kab/Kota
			Peningkatan Akses Informasi Kesehatan melalui Media Website	Terinformasinya penyelenggaraan Program/kegiatan dan isu bidang kesehatan melalui media online	1	Terjadinya Down / Kerusakan Pada Server Website Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Serangan Hacker/ Penyusup dan Kurangnya SDM yang berkompeten dibidang IT.	UC	Tidak dapat diaksesnya Situs Website Dinas Kesehatan	4	3	12	Sedang	Melakukan Pemeriksaan Rutin Jaringan Keamanan terhadap Website Dinas Kesehatan	5	Melakukan Kerjasama dengan Diskominfo	2020	Kepala OPD
					2	Berkurangnya Kontribusi Penulis Website dalam menulis Artikel kesehatan	Tidak terpenuhinya jumlah artikel yang diterbitkan sesuai target.	C	Kurangnya Informasi Kesehatan yang bisa diakses oleh masyarakat	3	3	9	Sedang	Memberikan Punishment dan Reward bagi kontributor website	4	Melakukan Koordinasi kepada kontributor website dan atasan langsung	2020	Kepala OPD
			Penyelenggaraan Riset Kesehatan	Terlaksananya pendampingan riset kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau	1	Terbatasnya riset kesehatan yang dilakukan pendampingan	Terbatasnya SDM yang kompeten dalam riset kesehatan	C	Bertambahnya beban kerja pada staf pendukung riset	3	3	9	Sedang	membentuk tim riset kesehatan yang didukung SDM Lintas Bidang/Seksi	3	pembentukan Tim Riset Dinas Kesehatan	2020	Ka. Sekretariat
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan kepada gubernur dan stakeholders	1	Data dasar penyusunan LKIP dan pengisian E- Performance tidak lengkap	Terlambatnya pemutakhiran data kinerja di Kabupaten/Kota	UC	dasar pengukuran kinerja tidak dapat diperoleh	3	3	9	Sedang	Feedback pelaporan kinerja terkait SPD, agar melakukan update berkala kinerja per bulan	4	koordinasi Bidang/Seksi dan Tim SAKIP Dinkes dalam penyusunan dokumen terkait SAKIP	2020	Kepala OPD
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa tenaga pendukung	Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT)	1	Keterlambatan Pembayaran Honorarium	Ketersediaan Anggaran di BPKAD, belum terbitnya verifikasi fingerprint oleh BKD	UC	terjadi keterlambatan pelaksanaan Tugas	5	4	20	Tinggi	Berkoordinasi dengan BPKAD terkait SPD, koordinasi BKD atas verifikasi fingerprint	4	Koordinasi aktif dengan BPKAD dan BKD	2020	Seluruh Pegawai Tidak Tetap (PTT)
			Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran	Pengelolaan dan penyediaan rutinitas perkantoran	1	Keterlambatan Pembayaran Uang Makan	Ketersediaan Anggaran di BPKAD, belum terbitnya verifikasi fingerprint oleh BKD	UC	terjadi keterlambatan pelaksanaan Tugas	5	4	20	Tinggi	Berkoordinasi dengan BPKAD terkait SPD, koordinasi BKD atas verifikasi fingerprint	4	Koordinasi aktif dengan BPKAD dan BKD	2020	Seluruh pegawai Tenaga Harian Lepas (THL)
					2	Ketersediaan ATK, alat listrik dan Elektronik, pranko/materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta bahan bakar minyak/gas	Pemakaian ATK, alat listrik dan Elektronik, pranko/materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta bahan bakar minyak/gas, tidak terkontrol	C	sampai Triwulan IV ATK, alat listrik dan Elektronik, pranko/materai dan benda pos lainnya, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta bahan bakar minyak/gas, tidak mencukupi	2	2	4	Rendah	Dibuat buku ketersediaan barang habis pakai dan dibuat tanda terima pemakaian barang habis pakai sebagai contoh pemakaian barang	3	Pengaturan manajemen ketersediaan BHP	2020	Kasubbag

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		PENYEBAB RISIKO	C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO				D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian	Tingkat Efektifitas			
					3	Masih adanya informasi (fix, telepon kantor dan internet) tidak bisa digunakan	Jaringan telekomunikasi dikomplek perkantoran pemprov kepri belum tersedia, jaringan internet sering ada gangguan	C	adanya informasi dan data/surat masuk/surat keluar yang lambat diproses	2	3	6	Rendah	sementara waktu dikomplek perkantoran dampak tidak menggunakan jaringan telepon dan fax saat ini menggunakan internet, dan jika internet bermasalah agar petugas/pegawai dapat berinisiatif untuk menggunakan jaringan internet lain seperti	4	Penyediaan jaringan nirkabel cadangan	2020	Kasubbag
					4	Berlebihnya pengajuan langganan surat kabar/majalah oleh media	makin bertambahnya volume surat kabar/majalah baik nasional maupun lokal yang harus dibayarkan	C	adanya protes dari pihak media yang belum bisa tertampung	4	4	16	Sedang	dibuat surat kabar/majalah yang sudah berlangganan, lihat pagu anggaran kalau kemungkinan penambahan media baru jika tidak diberi pengertian dan diinformasikan sebaik mungkin secara transparan informasi dan data yang ada	4	Pengelolaan kuantitas sewa surat kabar dan majalah	2020	Kasubbag
					5	Kurangnya anggaran service dan suku cadang	kemungkinan terjadi kerusakan berat pada kendaraan	UC	Mobilisasi urusan kedinasan terganggu	3	2	6	Rendah	Anggaran yang sudah ada diefektifkan dan jika ada penggunaan dana lebih besar dari pagu harapkan dianggarkan pada tahun mendatang	4	Pengalokasian belanja jasa servis dan perawatan yang memadai	2020	Kasubbag
					6	Keterlambatan pengurusan pembayaran kendaraan bermotor	Lambatnya pencairan anggaran pengurusan pajak	C	Keterlambatan pembayaran pajak dikenai denda	2	2	4	Rendah	Pengurus aset agar mengontrol tanggal jatuh tempo pembayaran pajak agar dapat disiapkan anggarannya pada waktu dibutuhkan	4	Perjadwalan efektif pembayaran pajak kendaraan bermotor	2020	Kasubbag
					7	Penyediaan Belanja Cetak dan Penggandaan tidak terealisasi sepenuhnya	Makin banyak data dan informasi berbentuk digital	C	Serapan anggaran yang kurang maksimal	1	2	2	Rendah	Memfaatkan anggaran yang ada dan jika terdapat anggaran yang masih belum terealisasi laporkan segera agar dapat diambil inisiatif penggunaan anggaran untuk pemanfaatan lainnya misalnya untuk mencetak buku SPIP/RTP, buku laporan tahunan dan laporan lainnya yang tidak dianggarkan biaya cetaknya	4	Koordinasi Bidang/Seksi untuk bahan cetak yang diperlukan	2020	Kasubbag
					8	Sulitnya mencari gedung/rumah/gudang untuk disewa	Ketidakterediaan tempat untuk meletakkan file/dokumen dalam rangka pengarsipan	C	Kemungkinan terjadinya kehilangan dokumen	2	3	6	Rendah	Melakukan pengarsipan dengan keterbatasan tempat	4	Pencarian informasi sebelum tanggal jatuh tempo	2020	Kasubbag
					9	Masih terdapat undangan kedinasan/ urusan kedinasan lainnya yang tidak dapat dihadiri	Masih terjadinya kekurangan anggaran perjalanan dinas	UC	Kemungkinan kurangnya koordinasi dan penyelesaian tugas-tugas kedinasan	3	3	9	Sedang	Mengefektifkan penggunaan anggaran perjalanan dinas	4	Pengoptimalan pemanfaatan perjalanan dinas	2020	Kasubbag

NO	PROGRAM		KEGIATAN		RISIKO		C/UC	DAMPAK	LEVEL RISIKO				PENGENDALIAN YANG ADA		RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA PROGRAM	TUJUAN PROGRAM	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	NO	PERNYATAAN RISIKO			PENYEBAB RISIKO	D	K	SKOR	KATEGORI	Uraian Pengendalian				Tingkat Efektifitas
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran bagi aparatur	2	Masih kurangnya ketersediaan Barang/sarana prasarana kerja bagi pegawai	Meningkatnya jumlah pegawai dan jumlah pekerjaan	UC	Pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal	3	4	12	Sedang	Memerintahkan petugas pemegang barang untuk mencatat aset yang ada dengan baik dan menginventarisir kebutuhan alat kantor dan melaporkan segera ke subbag umum dan kepegawaian untuk penyediaan sarana/prasarana/alat kantor	4	Inventarisasi dan manajemen aset berkala	2020	Aparatur
11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3	Diklat/Pelatihan yang dibutuhkan pegawai tidak tersedia	Kurangnya informasi akan jadwal pelatihan/bimtek	C	Pegawai tidak dapat memanfaatkan Pelatihan/Diklat yang dibutuhkan	3	2	6	Rendah	Aktif melakukan pencarian informasi pelaksanaan bimtek/pelatihan/diklat Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi / Balai Diklat	4	Pengoptimalan pelaksanaan Bimtek/Diklat/Pelatihan bagi pegawai sesuai rekomendasi kebutuhan	2020	Aparatur
				Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3	Masih adanya tugas-tugas yang tidak dipahami aparatur/ pegawai	Masih adanya pegawai/ aparatur yang belum mengikuti Bimtek/ pelatihan tertentu	C	Terjadi kesalahan pelaksanaan tugas	3	3	9	Sedang	setiap atasan langsung mengidentifikasi setiap tugas yang dilaksanakan staf agar tugas yang dilaksanakan dipastikan sudah dipegang oleh pegawai yang sudah mengikuti pelatihan/bimtek, jika belum perlu di usulkan untuk disertakan mengikuti Bimtek/ Pelatihan	3	Menyusun Analisa Kebutuhan Pelatihan/Diklat Bimtek ASN	2020	Aparatur
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Pengembangan dan Pemerataan Pembangunan Daerah	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Kepulauan Riau	1	Ketidakhadiran Narasumber	padatnya jadwal narasumber	C	informasi penting yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran tidak dapat diterima oleh peserta	2	3	6	Rendah	melakukan penjadwalan ulang kegiatan materi pusat tetap dikirimkan ke panitia daerah sehingga informasi tidak terputus	4	Koordinasi jadwal narasumber sejak awal tahun melalui surat resmi	2020	Kasubbag
					2	Kehadiran peserta tidak lengkap	jadwal pesawat, bertepatan dengan acara penting di daerah, keterbatasan SDM perencanaan di daerah	C	informasi terputus karena ketidakhadiran peserta	1	2	2	Rendah	melakukan konfirmasi peserta sejak jauh hari, minimal 5 hari sebelumnya, jika terdapat peserta yang berhalangan hadir, dilakukan redisposisi	4	Info rencana kegiatan 1 bulan sebelum pelaksanaan	2020	Kasubbag

Tanjungpinang, 13 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. H. TJETJEP YUDIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19600630 198303 1 013



DINAS KESEHATAN
Provinsi Kepulauan Riau

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C2 Lantai 2 dan 3 Dompok Laut
Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau